

NASKAH ORISINAL

Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD

Eko Budi Santoso^{1,*} | Sutikno² | Vely Kukinul Siswanto¹ | Yuni Setyaningsih³

¹Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

²Departemen Statistika, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

³Departemen Studi Pembangunan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Korespondensi

*Eko Budi Santoso, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia. Alamat e-mail: eko_budi@urplan.its.ac.id

Alamat

Laboratorium Pengembangan Wilayah, Pesisir dan Lingkungan, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya, Indonesia

Abstrak

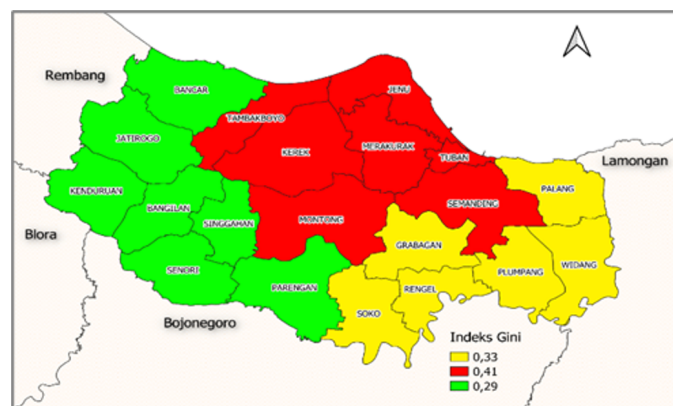
Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Perangkat Daerah dalam mencapai IKU diwujudkan dalam pendampingan dan pelatihan yang disusun secara komprehensif sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Sesuai dengan sasaran strategis RPJMD Kabupaten Tuban Tahun 2021-2026, salah satu isu strategis dalam hal urusan sosial adalah tingginya angka kemiskinan. Penanganan masalah kemiskinan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus terintegrasi dan sinergi antar berbagai sektor. Peningkatan Kapasitas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilakukan melalui sinergitas program dalam RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah). Sinergitas ini diperoleh melalui analisis akar masalah dan review kebijakan dari kemiskinan dalam hal ekonomi dan sosial. Berdasarkan akar masalah dan review kebijakan, strategi pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilakukan melalui peningkatan kapasitas ekonomi dan penjaminan sosial. Sinergitas antar OPD dalam pengurangan kemiskinan dilakukan melalui integrasi program kegiatan dan kerjasama antar OPD yang dilakukan dalam bentuk Focus Group Discussion (FGD). Hasil kegiatan pendampingan ini diperoleh 13 program pada OPD di Kabupaten Tuban yang dapat disinergikan untuk percepatan penanganan kemiskinan dan peningkatan kondisi sosial-ekonomi masyarakat. Apabila sinergitas program dari OPD berhasil terlaksana maka tujuan untuk meningkatkan penjaminan sosial di Kabupaten Tuban akan dapat terwujud.

Kata Kunci:

Pengentas Kemiskinan, Strategi Pembangunan, Integrasi Program, Tata Kelola Pemerintahan

1 | PENDAHULUAN

Kabupaten Tuban adalah salah satu wilayah prioritas percepatan pembangunan ekonomi di Jawa Timur yang memiliki beragam potensi salah satunya pusat industri dan pertambangan (Perpres 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Jawa Timur). Potensi yang ada perlu dioptimalkan dan diselaraskan dengan melalui perencanaan pembangunan yang dijabarkan dalam program dan kegiatan yang diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, dan tetap mempertimbangkan keberlanjutan^[1]. Pembangunan pada hakekatnya merupakan proses transformasi multi dimensi dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi tingkat kesenjangan antar daerah^[2]. Kabupaten Tuban berada di jalur pantai utara (Pantura) Pulau Jawa dengan luas 1.904,70 km² dan panjang pantai mencapai 65 km. Jumlah penduduk Kabupaten Tuban pada bulan September 2020 menurut hasil SP2020 adalah sebanyak 1.198.012 jiwa. Kabupaten Tuban sendiri menurut data BPS tahun 2021, merupakan lumbung padi terbesar ke-4 se-Jawa Timur. Namun terdapat penduduk miskin di Kabupaten Tuban pada Tahun 2021 pada bulan Maret 2021 sebanyak 192.580 jiwa atau mengalami peningkatan sebesar 5.440 jiwa dari tahun sebelumnya.



Gambar 1 Peta wilayah Kabupaten Tuban.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban harus mampu menggerakkan sistem pemerintahan yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan mulai dari perencanaan hingga proses evaluasi. Hal tersebut merupakan upaya pelaksanaan prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik sebagai sebuah komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum^{[3][4]}. Pemerintah daerah juga memiliki tugas melakukan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangannya untuk menetapkan prioritas program dan kegiatan pembangunan di daerahnya^[5].

Pengentasan kemiskinan menjadi agenda global sebagaimana tercantum dalam tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG), dimana agenda pengentasan kemiskinan akan terkait dengan agenda pembangunan lainnya^[6]. Kabupaten Tuban termasuk dalam kabupaten/kota prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024. Dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, pemerintah Tuban mengadakan beberapa program-program yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun beberapa program dinilai masih belum secara spesifik menasar kemiskinan di Kabupaten Tuban tersebut. Permasalahan yang ada pada program tersebut adalah kurangnya integrasi program antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kabupaten Tuban itu sendiri. Berdasarkan uraian permasalahan diatas perlu dilakukan kegiatan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan di Kabupaten Tuban dalam mengatasi masalah kemiskinan. Selain itu perlu dilakukannya evaluasi dan pemetaan program-program antar OPD. Adapun manfaat dilakukannya kegiatan ini yaitu memberikan rekomendasi kepada pemerintah Kabupaten Tuban dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Salah satu dimensi yang penting untuk mencapai *Good Governance* Kabupaten Tuban adalah evaluasi kinerja instansi pemerintah^[7]. Untuk dapat mengukur tingkat keberhasilan instansi pemerintah Kabupaten Tuban dalam merealisasikan semua visi dan misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Dalam menunjang kegiatan ini, perlu dilakukan identifikasi program-program yang sudah berjalan melalui studi dokumen dengan metode review kebijakan

yang sudah tersedia di Kabupaten Tuban terkait dengan program pengurangan kemiskinan. Strategi pengentasan kemiskinan dapat dilakukan dengan fokus utama meningkatkan kinerja penanggulangan kemiskinan oleh instansi pemerintah daerah melalui upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia^[8]. Pemetaan akar masalah kemiskinan yang dibagi berdasarkan aspek sosial dan aspek ekonomi menggunakan tools *fish-bone analysis*, *Focus Group Discussion*, dsb. Adapun output dari kegiatan ini yaitu perumusan rekomendasi kebijakan terkait program pengurangan kemiskinan di Kabupaten Tuban.

2 | METODE PENELITIAN

2.1 | Waktu dan Tempat

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan selama periode bulan Juni-Oktober 2022, bertempat di Kantor Bupati Kabupaten Tuban, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dengan melibatkan unsur pimpinan dan staf Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

2.2 | Kelompok Sasaran

Kelompok sasaran yang terlibat dalam kegiatan ini adalah organisasi perangkat daerah (OPD) yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap masalah kemiskinan di Kabupaten Tuban. Pemerintah Kabupaten Tuban memiliki organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsinya masing-masing sebagai mana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tuban.

2.3 | Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi beberapa tahapan, yaitu: pengumpulan data awal, studi dokumen, kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD), analisa data, dan perumusan hasil.

2.3.1 | Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan metode pengumpulan data yang mengandalkan dokumen seperti kebijakan serta peraturan yang tertulis. Menurut Sugiyono, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, serta karya^[9]. Bentuk tulisan yaitu seperti cerita, *life histories*, catatan harian, peraturan, kebijakan, dan lainnya. kedua, bentuk gambar, yaitu seperti dalam bentuk foto, sketsa, dan lainnya. ketiga, bentuk karya yaitu seperti karya seni berupa gambar, film, dan lainnya. Studi dokumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi RKPD Kabupaten Tuban 2023.

2.3.2 | *Focus Group Discussion* (FGD)

Focus Group Discussion disingkat sebagai FGD merupakan forum diskusi dengan fokus yang membahas suatu masalah tertentu dalam bentuk grup. Menurut Irwanto, FGD merupakan suatu proses dalam pengumpulan data serta informasi yang sistematis tentang permasalahan tertentu secara spesifik melalui diskusi dalam bentuk kelompok atau grup^[10]. FGD dalam penelitian ini digelar pada tanggal 14,15, dan 22 Juni 2022 yang dilaksanakan di Kantor Bupati Tuban. Kegiatan ini melibatkan antara lain terdapat 10 organisasi perangkat daerah (OPD) dengan program kerja yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban. *Focus Group Discussion* melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terdiri dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Diskoperindag), Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP2P), Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga serta Pariwisata (Dinparbudpora), Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan KB (DinKes), Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta PMD (DinSosP3A), Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian (Dinakerin), Dinas Pendidikan (Dispendik), dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan KP (DPUPRKP).

2.3.3 | Metode Analisis Data

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Menurut Sugiyono, metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi^[11]. Dalam kegiatan ini, peneliti melakukan review kebijakan tentang pengurangan kemiskinan yang ada di Kabupaten Tuban.

Kegiatan ini juga memakai analisis *fishbone* yang mana merupakan salah satu teknik yang efektif dalam menganalisis data yang ada untuk mengidentifikasi permasalahan, dengan menganalisis penyebab-penyebab masalah yang terjadi. Analisis ini digunakan untuk menganalisis permasalahan dengan mencatat semua faktor yang mempengaruhi masalah kemiskinan di Kabupaten Tuban. Faktor-faktor tersebut didapatkan dari hasil FGD yang telah dilakukan.

Selain kedua metode yang telah disebutkan sebelumnya, kegiatan ini juga menggunakan *stakeholder analysis* yaitu proses mengidentifikasi baik perorangan atau kelompok yang akan mempengaruhi atau dipengaruhi oleh suatu tindakan yang akan dilakukan lalu dikelompokkan dengan dampak dari tindakan yang dilakukan. Analisis ini digunakan dengan tujuan agar tercipta kerjasama antara pemangku kepentingan di Kabupaten Tuban dalam mengatasi tingkat kemiskinan yang ada. Analisis ini tentunya dilakukan saat FGD masih berlangsung.

2.4 | Proses dan Prosedur Penyelenggaraan Pendampingan

Adapun dalam kegiatan ini proses dan prosedur penyelenggaraan pendampingan dilakukan diantaranya seperti:

1. Tahap pertama melakukan survey ke lokasi dengan stakeholder terkait. Untuk mengetahui keadaan eksisting terkait dengan isu atau masalah yang ada, serta kondisi sosial ekonomi Kabupaten Tuban.
2. Tahap kedua melakukan pemetaan stakeholder dari berbagai instansi terkait untuk melakukan identifikasi tugas, fungsi, dan peran masing-masing OPD dalam menangani masalah kemiskinan.
3. Tahap ketiga melakukan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) untuk mengidentifikasi akar masalah kemiskinan dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat (Gambar (2)).

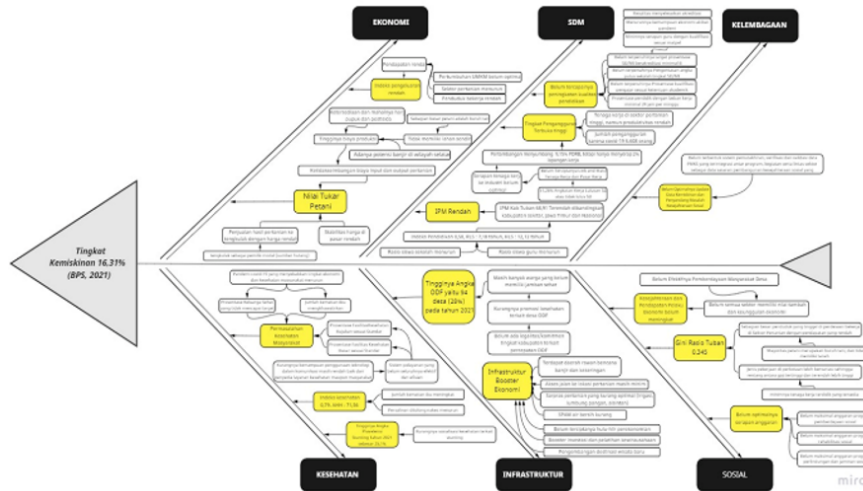


Gambar 2 Kegiatan FGD bersama OPD Kabupaten Tuban.

4. Tahap keempat melakukan perumusan langkah-langkah penanganan kemiskinan berdasarkan hasil *Focus Group Discussion* (FGD) sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD.

3 | HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemetaan permasalahan kemiskinan di Kabupaten Tuban dilakukan dengan Analisa *Fishbone* untuk mengetahui akar masalah dan faktor-faktor penyebabnya. Berdasarkan hasil fishbone analysis, terdapat faktor-faktor yang menyebabkan tingginya tingkat kemiskinan di kabupaten Tuban (Gambar (3)). Faktor tersebut yaitu ekonomi, sumber daya manusia (SDM), kelembagaan, kesehatan, infrastruktur, dan sosial.



Gambar 3 Diagram detail *fishbone* faktor penyebab kemiskinan di Kabupaten Tuban.

Gejala faktor-faktor penyebab tingginya kemiskinan di Kabupaten Tuban dirumuskan pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Gejala Faktor *Fishbone*

| No | Faktor | Gejala |
|----|---------------|---|
| 1 | Ekonomi | Nilai tukar petani Indeks pengeluaran rendah |
| 2 | SDM | IPM rendah Tingkat pengangguran terbuka tinggi Belum tercapainya peningkatan kualitas pendidikan |
| 3 | Kelembagaan | Belum optimalnya update Data Kemiskinan dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial |
| 4 | Kesehatan | Permasalahan kesehatan masyarakat Indeks Kesehatan 0,79, Angka harapan hidup 71,56 Tingginya angka Prevalensi Stunting Tahun 2021 sebesar 25,1% |
| 5 | Infrastruktur | Tingginya angka ODF yaitu 94 desa (28%) tahun 2021 Infrastruktur Booster Ekonomi |
| 6 | Sosial | Belum optimalnya serapan anggaran Kesejahteraan dan pendapatan pelaku ekonomi belum meningkat Gini Rasio Tuban 0,345 |

Setelah mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Tuban, selanjutnya dilakukan studi dokumen yakni berupa *review* kebijakan yang terkait dengan pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban. Dokumen yang menjadi rujukan adalah dokumen rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tuban Tahun 2023. Dalam RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023, terdapat empat strategi utama Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SKPD). SKPD mengacu pada empat strategi dalam Perpres No. 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yaitu:

1. Perbaikan program perlindungan sosial (Perlindungan dalam menghadapi guncangan: jatuh sakit, kematian art, kehilangan pekerjaan, bencana alam);
2. Peningkatan akses terhadap pelayanan dasar (Pemenuhan kebutuhan pendidikan, pangan, kesehatan, infrastruktur);
3. Pemberdayaan kelompok masyarakat miskin (Peningkatan kapasitas masyarakat miskin agar lebih dapat berupaya mandiri);
4. Pembangunan inklusif (Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan).

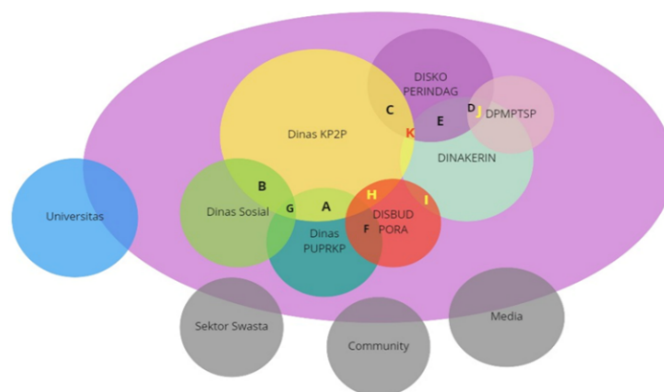
Dalam merumuskan strategi penanggulangan kemiskinan berdasarkan tugas dan fungsi OPD, didapatkan 2 tema besar dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tuban yaitu peningkatan kapasitas ekonomi dan perlindungan sosial dengan rincian OPD yang terkait sebagai berikut:

1. Peningkatan Kapasitas Ekonomi: DPMPTSP, Dinparbudpora, DPUPRKP, Diskoperindag, DKP2P, dan Dinakerin.
2. Perlindungan Sosial: Dinsos P3A, Dinkes, DPUPRKP, Dispendik, dan DKP2P.

Adapun, data karakteristik penduduk miskin Kabupaten Tuban dapat diperoleh melalui Dispendukcapil bekerjasama dengan DPMPTSP.

3.1 | Peningkatan Kapasitas Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Tuban, maka perlu adanya kolaborasi antar OPD terkait program-program yang dianggap dapat dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antar OPD, tidak secara terpisah. Penentuan tersebut didasarkan kepada program kerja setiap OPD yang memiliki kemiripan baik tujuan maupun sasaran menurut RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023. Di sisi lain, disamping pelibatan OPD, pelibatan stakeholder lain seperti akademisi di universitas, swasta, komunitas masyarakat, dan media juga perlu didorong agar kolaborasi yang ada dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut dijelaskan dalam Diagram Venn yang dapat dilihat pada Gambar (4).



Gambar 4 Diagram Venn kolaborasi antar dinas dalam peningkatan kapasitas ekonomi.

Keterangan:

- (A) Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian (irigasi, jalan desa, DAM, dll)
- (B) Pengembangan Kawasan Perdesaan
- (C) 1. Pemantauan stok, pasokan dan harga barang kebutuhan pokok. 2. Kegiatan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pesticida Bersubsidi. 3. Pengembangan UMKM Pengolah hasil perikanan
- (D) Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, Industri, dan Perijinan
- (E) Pemberdayaan melalui kemitraan usaha mikro (Diskoperindag dan Disnakerin)
- (F) Pengembangan dan rehabilitasi kawasan cagar budaya (Dibudpora dan Dinas PUPRKP)
- (G) Penanggulangan bencana banjir dan kekeringan terutama pada sektor pertanian (Dinas KP2P, Dinas sosial, dan Dinas PUPRKP)
- (H) Peningkatan kapasitas kaum muda untuk pengembangan ekonomi basis (Dinas KP2P, Dinas PUPRKP, Dibudpora)
- (I) Pengembangan ekonomi kreatif pada kaum muda untuk mengurangi pengangguran
- (J) Integrasi perijinan industri, UMKM dengan permodalan
- (K) Pengembangan UMKM ataupun IKM pengolahan pertanian, perikanan, dan peternakan yang dikolaborasikan dengan industri besar.

Diagram Venn diatas menunjukkan keterkaitan kolaborasi antar instansi guna melaksanakan program peningkatan kapasitas ekonomi di Kabupaten Tuban, berikut rinciannya:

- Dalam upaya meningkatkan kapasitas ekonomi Kabupaten Tuban di bidang pertanian, diperlukannya penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana Pertanian berupa irigasi, jalan desa, DAM, dll yang membutuhkan kolaborasi antara Dinas KP2P dan PUPRKP untuk melaksanakannya.
- Selain itu, Program Pengembangan Kawasan Perdesaan dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kapasitas ekonomi. Program ini dilaksanakan dengan kolaborasi antara Dinas KP2P dan Dinas Sosial.
- Dibutuhkannya kolaborasi antara Dinas KP2P dan Diskoperindag untuk melakukan pemantauan stok, Pasokan, dan harga barang kebutuhan pokok. Melakukan pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk serta Pesticida Bersubsidi. Terakhir melakukan Program Pengembangan UMKM yang mengolah hasil perikanan.
- Program Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan, Industri, dan Perizinan adalah kolaborasi antara DPMPTSP dan Diskoperindag guna membantu masyarakat khususnya di bidang industri dan perdagangan.
- Program Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha mereka serta hal ini dapat berperan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi di Kabupaten Tuban. Dinas yang berkolaborasi dalam program ini adalah Dinas KP2P, Disperindag, dan Dinakerin.
- Program pengembangan dan rehabilitasi kawasan cagar budaya juga perlu dilakukan dan dibawah pengawasan oleh Disbudpora, Dinas KP2P, dan Dinas PUPRKP yang akan menghasilkan program prioritas antar OPD dalam proses untuk peningkatan kapasitas ekonomi dari hulu ke hilir.
- Program penanggulangan Bencana Banjir dan Kekeringan terutama bagi sektor pertanian yang dibawah oleh antar dinas Dinas KP2P, Dinas PUPRKP, dan Dinas Sosial untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Kabupaten Tuban.
- Peningkatan kapasitas kaum muda untuk pengembangan ekonomi basis juga bisa dilakukan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi yang dilaksanakan dari Dinas Disbudpora dan Dinas KP2P Kabupaten Tuban sendiri dengan meningkatkan program prioritas atau program unggulan dari masing masing OPD.

- Pengembangan Ekonomi Kreatif pada kaum muda untuk mengurangi pengangguran dapat dilakukan melalui dinas Disbudpora dan Dinakerin dengan yang akan menghasilkan program prioritas antar OPD dalam proses untuk peningkatan kapasitas ekonomi dari hulu ke hilir.
- Integritas perjanjian industri, UMKM dengan permodalan dari kolaborasi DPMPTSP, Disperindag, dan Dinakerin dapat dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Kabupaten Tuban yang akan menghasilkan program prioritas antar OPD dalam proses untuk peningkatan kapasitas ekonomi dari hulu ke hilir.
- Pengembangan UMKM ataupun IKM pengelolaan pertanian, perikanan, dan peternakan yang dikolaborasikan dengan industri besar dan dari instansi pemerintah yaitu Dinakerin dan Dinas KP2P dapat juga dijadikan pertimbangan untuk meningkatkan kapasitas ekonomi Kabupaten Tuban yang akan menghasilkan program prioritas antar OPD dalam proses untuk peningkatan kapasitas ekonomi dari hulu ke hilir.

Tabel 2 Tahapan Kegiatan dan Strategi

| No | Tahapan | Strategi |
|----|---------|--|
| 1 | Proses | Pemasaran <i>online</i> (e-commerce) Penyediaan stok/olah potensi produk unggulan pertanian Pelatihan dan peningkatan kapasitas UKM (GMF) Klinik UKM dan inkubasi Kemitraan UKM Ketersediaan stok bahan baku (<i>Supply Chain</i>) Standarisasi produk (<i>Market Oriented</i>) <i>Market Assesment</i> |
| 2 | Hulu | Perizinan/ regulasi Pelibatan IKM dan UMKM Peningkatan daya saing IKM di era globalisasi Pengendalian distribusi pupuk (pertanian dan perikanan), SPBU nelayan, gas Permodalan petani Permodalan UKM melalui koperasi |
| 3 | Hilir | Rumah produksi/kemasan Pemasaran atau produk promosi (misalnya <i>digital marketing</i>) Pengendalian stok bahan pangan dan pupuk Pembinaan pasar desa Pengendalian inflasi Promosi produk Kemitraan toko modern Orientasi ekspor (<i>assessment</i>) Neraca perdagangan |

Adapun dari hasil pemetaan OPD dalam rangka peningkatan kapasitas ekonomi, selanjutnya dilakukan perincian mengenai implementasi dari kolaborasi yang telah ditentukan dari segi proses, serta strategi yang perlu dilakukan dari hulu ke hilir.

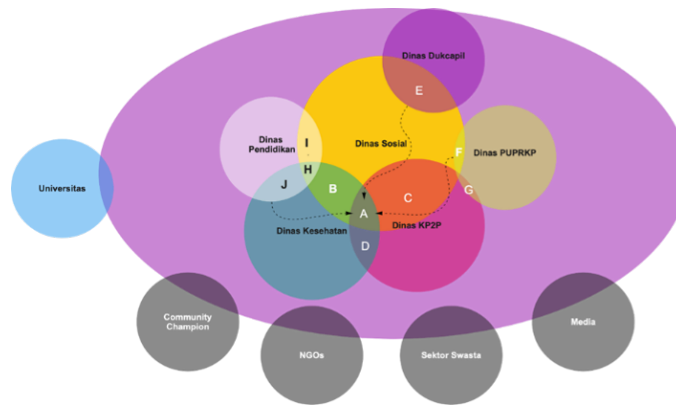
Adapun kriteria sasaran dalam usaha peningkatan kapasitas ekonomi dengan program diarahkan pada target sasaran yang berada pada lokasi yang memiliki DTKS tinggi dengan rincian sasaran sebagai berikut:

- Kelompok Tani dan Kelompok Wanita Tani
- Pokdakan, Nelayan, dan Rumah Tangga Perikanan

- Pembudidaya Ikan, Pokdakan, dan Rumah Tangga Perikanan
- Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Usaha Simpan Pinjam (USP) di Kabupaten Tuban
- Industri Kecil Menengah dan UMKM Kabupaten Tuban
- Masyarakat pencari kerja di Kabupaten Tuban

3.2 | Penjaminan Sosial

Dalam rangka menyelenggarakan program penjaminan sosial masyarakat di Kabupaten Tuban, maka perlu adanya kolaborasi antar OPD terkait program-program yang dianggap dapat dilaksanakan secara simultan antar OPD, tidak secara terpisah. Penentuan tersebut didasarkan kepada program kerja setiap OPD yang memiliki kemiripan baik tujuan maupun sasaran menurut RKPD Kabupaten Tuban Tahun 2023. Di sisi lain, di samping pelibatan OPD, pelibatan stakeholder lain seperti akademisi di universitas, *community champion*, swasta, *Non-Government Organizations* (NGOs), dan media juga perlu didorong agar kolaborasi yang ada dapat berjalan dengan optimal dan tepat sasaran. Bentuk-bentuk kolaborasi tersebut dijelaskan dalam diagram venn yang dapat dilihat pada Gambar (5) berikut.



Gambar 5 Diagram Venn kolaborasi antar dinas dalam penjaminan sosial.

Keterangan:

1. *Food and nutrition security* (stunting, kerawanan pangan, dll); 2. ODF (sanitasi dan air bersih); dan 3. Peningkatan kapasitas/penyuluhan SDM masyarakat, kelembagaan, dan petugas.
- Pemberian akses ke layanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan kelompok inklusi sosial (perempuan, anak, disabilitas, dan *mental health issue*).
- Pencegahan dan penanggulangan bencana/pertanian.
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan (keamanan pangan).
- Pemutakhiran data untuk perlindungan dan jaminan sosial, termasuk data terpilah gender.
- Rehabilitasi sosial kawasan permukiman tidak layak.
- Penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian (irigasi, dll).
- Mengintegrasikan layanan pendidikan dengan topik *food and nutrition security* (stunting, kerawanan pangan, dll) dan pelayanan sosial.
- Pemberian layanan pendidikan dan bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

(J) Pengenalan CTPS dan stunting di sekolah (di atas 1000 HPK).

Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah dapat mengadakan jaminan sosial dengan beragam program. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan beberapa program di bawah ini.

- Program dasar untuk penjaminan sosial khususnya di bidang kesehatan diantaranya adalah *Food and Nutrition Security* untuk mencegah terjadinya stunting dan juga kerawanan pangan, Program ODF untuk sanitasi dan air bersih, dan Peningkatan Kapasitas/ Penyuluhan SDM Masyarakat, Kelembagaan, dan juga Petugas. Program-program ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Dinas KP2P, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.
- Program pemberian akses ke layanan kesehatan dasar kepada masyarakat dan kelompok inklusi sosial seperti perempuan, anak, disabilitas, dan *mental health issue*. Diharapkannya program ini dapat membantu meningkatkan kesejahteraan sosial khususnya di bidang kesehatan karena selama ini cukup sulit bagi sebagian kelompok untuk mengakses fasilitas kesehatan dasar. Kolaborasi ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan.
- Program pencegahan dan penanggulangan bencana pertanian dapat dilakukan kolaborasi oleh Dinas KP2P dan Dinas Sosial. Diketahui jika pertanian menjadi salah satu mata pencaharian utama penduduk Kabupaten Tuban sehingga dapat dilakukan program jaminan sosial berupa pencegahan bencana pertanian.
- Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan (keamanan pangan). Program ini dapat menjadi filter untuk makanan dan pangan yang beredar di masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik melalui program jaminan sosial ini. Program ini dapat dilakukan dengan kolaborasi antara Dinas KP2P dan Dinas Kesehatan.
- Pemutakhiran data untuk perlindungan dan jaminan sosial, termasuk data terpilah gender. Program ini dapat membantu pemerintah untuk memilah dan menentukan siapa saja yang akan diberikan jaminan sosial sehingga pemberian bantuan tersebut tidak akan salah sasaran. Dinas terkait yang melakukan kolaborasi adalah Dinas Sosial dan Dinas DUKCAPIL.
- Program rehabilitasi sosial kawasan permukiman tidak layak dapat menjadi pertimbangan untuk penjaminan sosial dengan kolaborasi antara Dinas Sosial dan Dinas PUPRKP, pertimbangan ini juga dapat dijadikan program prioritas dari masing masing OPD. Contohnya pada Dinas Sosial adalah dengan program pengurangan kemiskinan dari BOS dan PIP, selain itu pada Dinas PUPRKP dengan program pengadaan prasarana pertanian, program rehabilitasi RLTH, program peningkatan PSU, dan Program pengelolaan dan pengembangan air bersih untuk rumah tidak layak.
- Program penyediaan dan pengembangan sarana prasarana pertanian juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penjaminan sosial dengan kolaborasi antara Dinas KP2P dan Dinas PUPRKP, pertimbangan ini juga dapat dijadikan program prioritas dari masing masing OPD. Contohnya pada Dinas KP2P adalah dengan program pengadaan prasarana pertanian, program pemantauan stok pasokan harga kebutuhan bahan pokok, pengawasan penyaluran penggunaan pupuk pestisida, serta pengembangan UMKM pengolahan hasil perikanan dan pertanian, selain itu pada Dinas PUPRKP dengan program pengadaan prasarana pertanian, program rehabilitasi RLTH, program peningkatan PSU, dan Program pengelolaan dan pengembangan air bersih untuk rumah tidak layak.
- Pertimbangan pada program untuk mengintegrasikan layanan pendidikan dengan topik *food and nutrition security* dan pelayanan sosial juga penting dengan kolaborasi dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial yang dapat dijadikan program prioritas dari masing masing OPD. Program dapat berupa pengurangan kemiskinan dengan bantuan BOS dan PIP, pembinaan stunting melalui kegiatan pendidikan mulai dari PAUD-SMP, dan Pemberian makanan tambahan melalui BOP PAUD.
- Pemberian layanan pendidikan dan bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan penjaminan sosial Kabupaten Tuban yang nantinya akan menjadi program prioritas seperti pengurangan kemiskinan dengan bantuan BOS dan PIP, program lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan penggalakan program kesetaraan melalui PKMB, dan dengan pemberian beasiswa.
- Program pengadaan CTPS dan stunting di sekolah untuk peningkatan penjaminan sosial masyarakat Kabupaten Tuban dapat dijadikan referensi dengan mengkolaborasi Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Tuban. Program prioritas

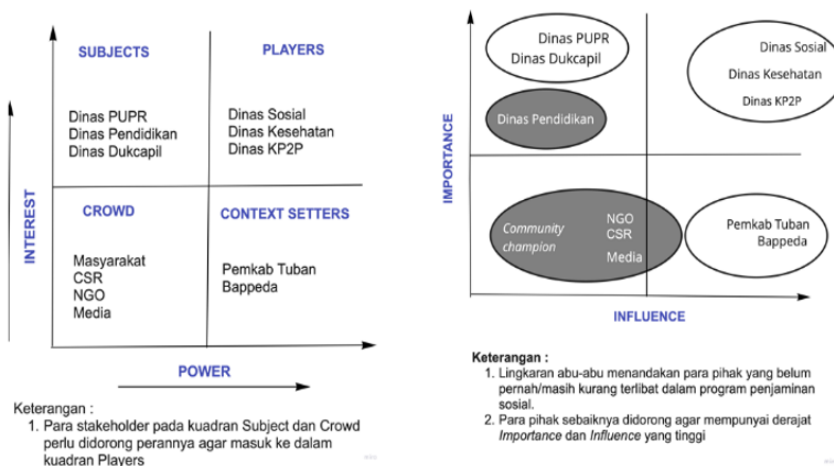
yang bisa dicananangkan adalah dengan adanya pembinaan melalui kegiatan pembinaan stunting melalui kegiatan pendidikan mulai dari PAUD-SMP, dan Pemberian makanan tambahan melalui BOP PAUD dalam pencegahan stunting.

Adapun kriteria sasaran dalam usaha penjaminan sosial dengan program diarahkan pada target sasaran yang berada pada lokasi yang memiliki masalah sosial dengan rincian sasaran sebagai berikut:

- Kelompok Tani, Kelompok Wanita Tani, Kelompok Pembudidaya Ikan, dan Kelompok Nelayan
- Penerima RS-Rutilahu
- Kelompok Rentan
- Industri Kecil Menengah dan UMKM Kabupaten Tuban
- Tenaga Kesehatan Masyarakat
- Kelompok Masyarakat BABS



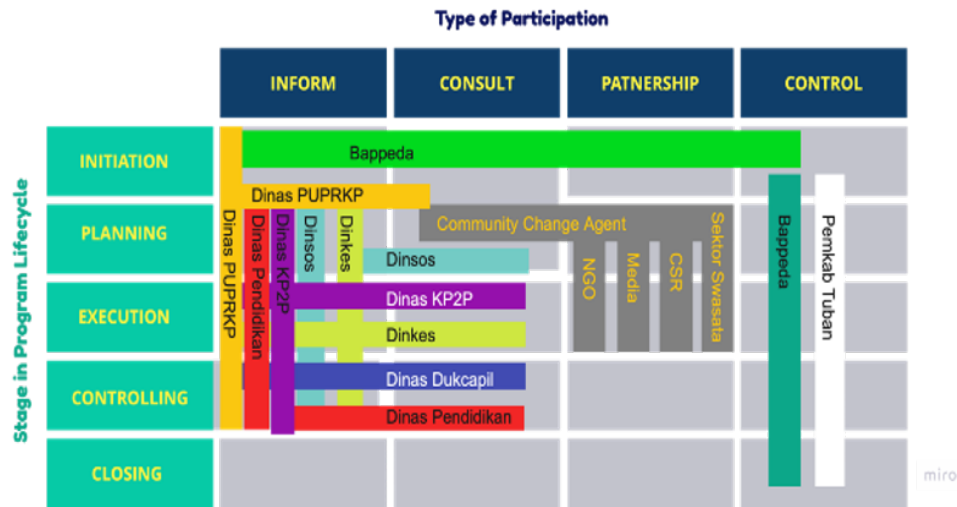
Gambar 6 Bersama stakeholder terkait.



Gambar 7 Kuadran analisis stakeholder.

Pada analisis stakeholder (Gambar (7)), beberapa stakeholder dipisahkan menjadi 4 Kuadran, yang dimana pada setiap kuadran-nya memiliki “peran” yang berbeda-beda. Pada analisis stakeholder, juga dibedakan menjadi menjadi 2 kategori. Pada analisis

pertama kategori yang menjadi pembanding adalah *Interest* dan *Power*. Untuk pada analisis kedua, kategori yang menjadi pembanding adalah *Importance* dan *Influence*.



Gambar 8 Stakeholder participation matrix.

Gambar (8) merupakan *Stakeholder Participation Matrix*. Matriks tersebut menjelaskan peran dari para stakeholder menurut bentuk partisipasinya dan tahapan dalam siklus program. Bisa dilihat dalam matriks, Pemerintahan Kabupaten Tuban sebagai lembaga legislatif mempunyai peran *controlling* dalam partisipasi, dan semua peran dalam tahapan siklus program. Untuk Bappeda juga mempunyai semua peran dalam bentuk partisipasi tetapi dalam tahapan Bappeda berada di peran *initiation* atau inisiator. Sementara untuk beberapa dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas KP2P memiliki peran yang sama dalam bentuk partisipasi maupun tahapan dalam siklus program yaitu dalam partisipasi meliputi peran informasi serta konsultasi, sementara dalam tahapan siklus program meliputi merencanakan, merealisasikan, dan pengawasan atau *controlling*. Dinas PUPRKP juga memiliki peran yang sama seperti dinas yang telah disebutkan sebelumnya, namun dalam tahapan siklus program dinas ini juga memiliki peran inisiator atau *initiation*. Untuk NGO (*Non-Governmental Organization*), Media, CSR (*Corporate Social Responsibility*), dan swasta memiliki peran partisipasi sebagai *partnership*, dan dalam tahapan siklus program memiliki peran merencanakan, dan merealisasikan. yang terakhir ada *community change agent* yang memiliki peran partisipasi sebagai *consult* dan *partnership* lalu peran dalam tahapan siklus program sebagai merencanakan.

Dalam RPJMD Kabupaten Tuban tahun 2021-2026 menjelaskan bahwa Kabupaten Tuban memiliki dua tantangan yaitu tingginya tingkat kemiskinan dan rendahnya IPM.

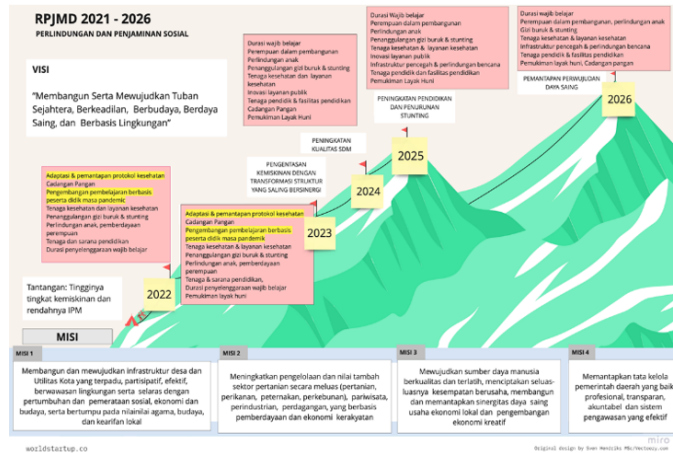
Menurut Gambar (9) analisis kegiatan dalam RKPD berdasarkan sasaran RPJMD pada tahun 2023, terdapat empat sasaran dalam RPJMD yang tidak didukung program dalam RKPD 2023.

3.3 | Rekomendasi Peningkatan Penjaminan Sosial

3.3.1 | Strategi *Food and Nutrition Security* dan ODF

Setelah melakukan analisis terhadap stakeholder dan juga membuat matriks partisipasi stakeholder, selanjutnya adalah melakukan rekomendasi untuk Strategi *Food and Nutrition Security*. Adapun beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menerapkan Strategi *Food and Nutrition Security*, antara lain:

- Peningkatan kapasitas dipetakan berdasarkan need assesment, kelompok sasaran, dan lokus yang membutuhkan.
- Memperbanyak intervensi sensitif untuk pencegahan stunting.
- Integrasi kegiatan pencegahan dan penurunan stunting dengan ODF.



Gambar 9 Timeline RPJMD 2021-2026.



Gambar 10 Analisis kegiatan dalam RKPD menurut sasaran RPJMD pada tahun 2023 di bidang perlindungan dan penjaminan sosial.

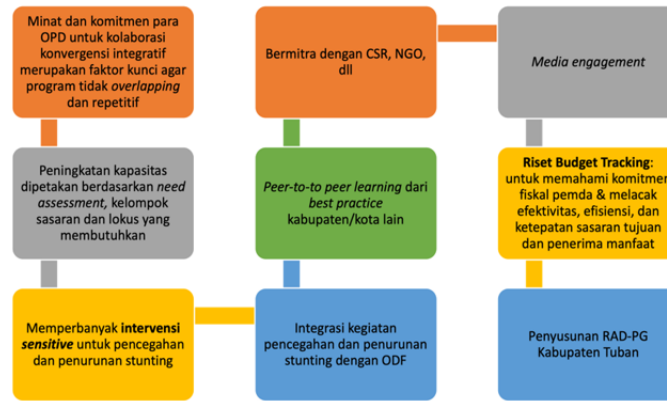
- Riset *Budget Tracking*: Untuk memahami komitmen fiskal Pemda pelindak efektivitas, efisiensi, dan ketepatan sasaran tujuan dan penerima manfaat.
- Minat dan komitmen OPD untuk kolaborasi konvergensi integratif merupakan faktor kunci agar tidak *overlapping* dan repetitif.
- Penyusunan RAD-PG Kabupaten Tuban
- Inovasi PMT berbasis lokal
- *Peer-to-peer learning* dari *best practice* kabupaten/kota lain
- Program Beyond 100 HPK: Melibatkan centennials dan millennials serta disabilitas

Tabel 3 Tahun Pelaksanaan dan Prioritas Kegiatan

| | |
|------------------|---|
| Tahun | 2022 |
| Prioritas | - |
| Pengerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Adaptasi dan pemantapan protokol kesehatan • Cadangan Pangan • Pengembangan pembelajaran berbasis peserta didik masa pandemi • Tenaga Kesehatan dan layanan kesehatan • Penanggulangan gizi buruk dan stunting • Perlindungan anak, pemberdayaan perempuan • Tenaga dan sarana pendidikan • Durasi penyelenggaraan wajib belajar |
| Tahun | 2024 |
| Prioritas | Peningkatan kualitas SDM |
| Pengerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Durasi wajib belajar • Perempuan dalam pembangunan • Perlindungan anak • Penanggulangan gizi buruk dan stunting • Tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan • Inovasi pelayanan publik • Tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan • Cadangan pangan • Permukiman layak huni |
| Tahun | 2026 |
| Prioritas | Pemantapan perwujudan daya saing |
| Pengerjaan | <ul style="list-style-type: none"> • Durasi wajib belajar • Perempuan dalam pembangunan • Perlindungan anak • Penanggulangan gizi buruk dan stunting • Tenaga kesehatan dan pelayanan kesehatan • Infrastruktur pencegah dan perlindungan bencana • Tenaga pendidik dan fasilitas pendidikan • Permukiman layak huni • Cadangan pangan |

- Menggunakan metode *Behavioral Change Communication* (BCC)
- Bermitra dengan CSR, NGO, dan lain sebagainya.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebagai bentuk rekomendasi untuk merealisasikan *strategi Food and Nutrition Security* dapat dilihat pada diagram pada Gambar (11).



Gambar 11 Bentuk rekomendasi untuk merealisasikan strategi food and nutrition security.



Gambar 12 Arahan Bupati Tuban dalam pemaparan hasil kesepakatan OPD.

3.3.2 | Sinergitas Program Kolaborasi Unggulan Antar OPD

Setiap OPD memiliki program masing-masing dengan tujuan yang untuk peningkatan penjaminan sosial. Beberapa program tersebut dinilai kurang bersinergi dengan program-program OPD yang lainnya. Berikut adalah beberapa rekomendasi yang diberikan untuk program dari setiap OPD yang dapat bersinergitas:

1. Dinas Pendidikan Kecamatan/Desa
 - Program lama sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan penggalakan program (paket A,B,C) melalui PKBM.
2. DKP2P PUPR
 - Pengadaan prasarana pertanian, meliputi: Pembangunan jalan produksi, pembangunan irigasi, pembangunan jalan usaha tani.
3. DKP2P Diskopumdag
 - Program pengelolaan pemasaran hasil perikanan
 - Pemantauan stok pasokan harga kebutuhan bahan pokok
 - Pengawasan penyaluran penggunaan pupuk pestisida bersubsidi

- Penembangan UMKM pengolahan hasil perikanan dan pertanian
4. PUPR Dinas Lingkungan
 - Program Rehabilitasi RTLH
 5. PUPR Disbudporapar
 - Program Peningkatan PSU (akses lokasi wisata)
 6. PUPR Pemerintah Desa Dinsos
 - Program pengelolaan dan pengembangan air bersih
 7. Dinas Pendidikan Dinkes
 - Pembinaan dengan melalui kegiatan pendidikan keluarga mulai dari PAUD hingga SMP
 - Pemberian makanan tambahan melalui BOP PAUD
 8. Dinas Pendidikan Disbudporapar
 - Pemberian Beasiswa
 9. DK2P Dinas Sosial
 - Fasilitas bantuan pokok terhadap petani, nelayan pembudidaya ikan, pengelola yang membutuhkan
 10. DK2P DPMPTSP
 - Fasilitas perizinan (NIB, BPOM, IMB, dan OSS)
 11. DK2P Disnakerin
 - Fasilitas pelatihan/kursus K3
 - Fasilitas pelatihan peningkatan SDM (Petani, nelayan, pembudidaya dan pengolah ikan)
 12. DK2P Dinkes
 - Penanggulangan Stunting
 - Fasilitas perizinan/P-IRT
 13. Dinas Pendidikan Dinsos
 - Program pengurangan Kemiskinan : BOS dan PI

Terdapat 13 program yang dari tiap program memiliki sinergitas dari tiap OPD yang berbeda-beda, target dan sasaran dari 13 program tersebut juga berbeda. Apabila sinergitas program dari OPD berhasil terlaksana maka tujuan untuk meningkatkan penjaminan sosial di Kabupaten Tuban akan dapat terwujud.

4 | KESIMPULAN

Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu program prioritas nasional, dan juga menjadi target utama pembangunan di daerah, termasuk Kabupaten Tuban yang memiliki angka kemiskinan tinggi di Jawa Timur. Penanganan masalah kemiskinan tidak dapat diselesaikan secara parsial, namun butuh pendekatan terintegrasi dan adanya sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD). Bappeda sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab dalam perencanaan pembangunan daerah perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan melibatkan setidaknya 12 OPD terkait.

Hasil *Focus Group Discussion* (FGD) menghasilkan 2 (dua) agenda utama untuk mengentaskan kemiskinan, yaitu melalui (1) penjaminan sosial, dan (2) peningkatan kapasitas ekonomi. Dalam rangka penjaminan sosial dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat di Kabupaten Tuban, maka perlu adanya kolaborasi antar OPD terkait program-program yang dianggap dapat dilaksanakan secara simultan dan terintegrasi antar OPD, tidak secara terpisah-pisah atau parsial berdasarkan ego-sektor masing-masing. Strategi *Food and Nutrition Security* dan ODF menjadi platform utama untuk meningkatkan penjaminan sosial bagi penduduk miskin. Sementara itu, Sinergitas Program Kolaborasi Unggulan Antar OPD diharapkan mampu mensinergikan 13 program yang dari tiap program memiliki kekhususan dari tiap OPD yang berbeda - beda, target dan sasaran dari 13 program tersebut juga berbeda.

5 | UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat atas dukungan Hibah Dana Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) tahun 2022 yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini. Selain itu kami ucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Tuban yang sangat kooperatif dalam membantu terlaksananya kegiatan pengabdian masyarakat ini.

Referensi

1. Kuncoro M. *Perencanaan Pembangunan*. Gramedia Pustaka Utama; 2018.
2. Kato I, Faridi A, Revida E, Damanik D, Siregar RT, Purba S, et al. *Manajemen Pembangunan Daerah*. Yayasan Kita Menulis; 2021.
3. Nubatonis SE, Rusmiwari S, Suwasono S. Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2015;3(1).
4. Safrijal S, Basyah MN, Ali H. Penerapan Prinsip-prinsip Good Governance oleh Aparatur Pelayanan Publik di Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kewarganegaraan* 2016;1(1).
5. Soares A, Nurpratiwi R, Makmur M. Peranan pemerintah daerah dalam perencanaan Pembangunan daerah. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 2015;4(2).
6. Ishatono I, Raharjo ST. Sustainable development goals (SDGs) dan pengentasan kemiskinan. *Share: Social Work Journal* 2016;6(2):159.
7. 12 principles of good governance. Centre of Expertise for Good Governance and Council of Europe; 2019. https://www.coe.int/en/web/good-governance/12-principles?_82_struts_action=%2Flanguage%2Fview&_82_languageId=fr_FR.
8. Marmujiono SP. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan dan Strategi Pengentasan Kemiskinan di Kab. Brebes Tahun 2009-2011. *Economics Development Analysis Journal* 2014;3(4).
9. Sugiyono A, *Memahami Penelitian Kualitatif Bandung*: CV. Alfabeta; 2005.
10. Irwanto. *Focus Group Discussion: Sebuah Pengantar Praktis*. Yayasan Obor Indonesia; 2007.
11. Sugiyono P, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta; 2009.

Cara mengutip artikel ini: Santoso, E.B., Sutikno, Siswanto, V.K., Setyaningsih, Y., (2023), Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Tuban Melalui Integrasi Program Antar OPD, *Sewagati*, 7(1):113–129, <https://doi.org/10.12962/j26139960.v7i1.447>.